

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan salah satu dari sekian banyak solusi yang dapat membantu publik untuk dapat percaya kembali pada keakuratan pelaporan keuangan dan meminimalkan malpraktik dalam pelaporan keuangan (Utami, 2015). Pada dasarnya yang menuntut adanya *enterprise wide risk management* yaitu prinsip keterbukaan pada perusahaan yang mengacu pada manajemen risiko. Oleh karena itu kekuatan mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Fathimiyah dkk, 2012).

Program ERM mempunyai manfaat yang lebih karena memberikan informasi tentang profil risiko perusahaan (Agista,2016). Akibatnya, untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan, perusahaan harus menganggap risiko sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risikonya, dan dengan demikian hal tersebut memerlukan sistem manajemen risiko perusahaan. Sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya meningkatkan pelaporan keuangannya serta menjaga reputasinya. Diperlukan pengawasan yang memadai agar sistem manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan dapat berjalan efektif (Halim et al., 2017).

Informasi mengenai risiko telah diungkapkan berdasarkan kerangka peraturan tertentu dengan waktu yang sama, beberapa perusahaan mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Manajemen risiko adalah suatu komponen yang sangat penting dalam bisnis ini mencakup identifikasi dan mengukur risiko (Zadeh et al.,2016). Yazid dkk (2012) berpendapat bahwa asset perusahaan yang dikelola dengan baik sangat berguna dalam mendukung kegiatan yang dapat memberikan manfaat keseluruhan bagi perusahaan dan pemegang saham. Konsekuensi dar

program ERM yang lemah dapat menyebabkan kerugian besar karena gangguan dalam operasi bisnis dan biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko. ERM diarahkan untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi pada organisasi bisnis.

Pengungkapan ERM harus diberitahukan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya agar para pemegang saham tidak dirugikan dalam pengambilan keputusan untuk investasi sahamnya. Karena setiap melakukan suatu investasi pada dasarnya investor diperlihatkan pada kekuatan yaitu “*high risk bring about high return*”, yang artinya ialah jika perusahaan ingin mendapatkan laba yang cukup banyak berarti perusahaan harus siap menerima lebih banyak risiko juga. Oleh sebab itu pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan harus memadai dan terbuka (Anisa, 2012). Kekuatan terhadap informasi pelaporan keuangan tahunan bias dilihat dengan bagaimana informasi tersebut diberikan kepada para investor (Agista, 2016). Runtuhnya beberapa perusahaan Amerika Serikat baik karena kecurangan maupun penipuan pelaporan akuntansi seperti yang di alami oleh Enron dan Worldcom membuat beberapa perusahaan berinisiatif untuk meningkatkan *good corporate governance* dengan memberikan perhatian terhadap peran dari Manajemen Risiko Subramaniam, et al (2009).

Pengungkapan *enterprise risk management* (ERM) menjadi sangat penting untuk para investor sejalan dengan banyaknya ketidakpastian yang akan muncul pada dunia bisnis. Informasi profil risiko perusahaan dan pengelolaan atas risiko merupakan informasi nonkeuangan yang sangat dibutuhkan oleh investor untuk menilai kondisi perusahaan. Hal-hal yang mengganggu tingkat profitabilitas perusahaan bermula dari risiko yang berasal dari internal maupun eksternal, sehingga perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya. *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Framework* mendefinisikan ERM sebagai sebuah proses yang diterapkan dalam penentuan strategi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kemungkinan yang potensial yang mungkin mempengaruhi entitas dan mengelola risiko-risiko dan kecenderungan risiko yang mungkin terjadi, untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian

tujuan entitas. Pengungkapan ERM juga berfungsi sebagai sinyal komitmen perusahaan untuk manajemen risiko (Hoyt dan Liebenberg, 2011).

Kasus kecurangan pada perusahaan-perusahaan besar banyak menyita perhatian para stakeholder, yang memiliki dampak kurangnya rasa percaya para pemegang saham terhadap akuratnya sebuah informasi pada pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Anisa (2012) mengatakan bahwa nilai-nilai yang ada pada laporan keuangan dianggap hanya disusun sekedarnya dengan standar dan aturan yang berlaku, tetapi gambaran yang diberikan tentang kondisi perusahaan kurang akurat.

Gambaran yang akurat tentang kondisi perusahaan yaitu dengan tidak memanipulasi laporan keuangan dengan mengungkapkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Maraknya malpraktik pada pelaporan keuangan telah banyak diterima oleh perusahaan, oleh sebab itu pihak investor merasa rugi. Investor merasa kurang percaya pada keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan.

Salah satu karakteristik perusahaan yang diduga memengaruhi kualitas keterbukaannya informasi terhadap pelaporan keuangan salah satunya mengungkapkan tentang risiko dalam perusahaan, agar meminimalkan risiko pada perusahaan yaitu dengan sistem pengendalian dan pengaliran perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan yang biasa disebut *good corporate governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* sebagai indikator yang ditawarkan oleh *organization for economic cooperation and development* (OECD) yaitu kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban dapat meminimalkan risiko yang akan ditanggung para pemegang saham. Ketatnya persaingan dan perkembangan ekonomi secara global yang terjadi saat ini membuat perusahaan yang ada di Indonesia harus dapat menunjukkan sikap yang lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan terlebih perusahaan yang *go public* di pasar modal. Pengungkapan informasi yang lebih transparan tersebut

akan membuat berbagai pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun pengguna informasi lainnya dapat terbantu dalam hal pengambilan keputusan maupun kesiapan dalam menghadapi perekonomian yang semakin berkembang (Almilia dan Retrinasari, 2007). Salah satu pemegang saham dalam sebuah perusahaan yaitu publik atau masyarakat pada umumnya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perusahaan.

Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, para investor membutuhkan laporan keuangan untuk dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan, sebagai contoh yaitu risiko. Risiko merupakan hal yang sama sekali tidak dapat dihindarkan. Masalah berbeda dengan risiko. Risiko merupakan sesuatu yang belum terjadi oleh sebab itu tidak semua risiko akan berdampak merugikan atau negatif, tetapi jika perusahaan bisa mengolah risiko dengan bijak maka risiko tersebut akan dapat dilalui (Firdaus, 2014).

Pada Maret 2017, kelemahan manajemen risiko masih terjadi, seperti yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food dimana terjadi penggelembungan dana sebesar Rp 4 T pada akun persediaan, piutang usaha, dan aset tetap perusahaan. Selain itu, penggelembungan dana sebesar Rp 662 M pada pos penjualan dan Rp 329 M pada EBITDA. PT Tiga Pilar Sejahtera juga diduga mengalirkan dana sebesar Rp 1,78 M kepada pihak-pihak berelasi yang tidak diungkapkan secara transparan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kecurangan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang berdampak pada penilaian reputasi perusahaan. Kasus ini berkaitan dengan risiko reputasi yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya kepemilikan saham dari PT Tiga Pilar Corpora yang merupakan pemegang saham pendiri sekaligus pemegang saham pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food hingga tersisa sebesar 5,28% dari total saham yang beredar. Oleh karena itu, pengelolaan risiko sangatlah penting bagi perusahaan sehingga dapat terhindar dari kerugian maupun kebangkrutan. Penilaian dan pengungkapan manajemen risiko sejak dini akan berdampak baik bagi keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Kemampuan perusahaan dalam

mengelola risiko diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak risiko terhadap kerugian perusahaan. (CNNIndonesia.com).

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah yang ada pada manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Dan masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah satu anggota komisaris diangkat sebagai satu komisaris utama. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersama waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam

mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 2014).

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara efektif dan memberikan pertanggung jawaban kepada pemegang saham. Anggota dewan komisaris harus bertindak secara transparan, iktikad baik dan telah melakukan *due diligence* serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal yang terbaik bagi perusahaan.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal. Pada penelitian terdahulu, menurut Taco & Ilat (2016).

Komite audit menjadi salah satu unsur penting bagi perusahaan dalam penerapan *good corporate governance*. Komite audit berperan penting dalam pelaporan keuangan dimana komite audit berperan dalam pengawasan pembuatan laporan keuangan oleh manajemen dan kegiatan audit oleh auditor. Keberadaan komite audit pada perusahaan BUMN di atur melalui keputusan menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Berjalannya fungsi dewan komisaris

dan komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga management menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian manajemen akan jujur mengelola perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengetahui secara keseluruhan keberhasilan suatu perusahaan adapun struktur *corporate governance* yang dapat mengetahui kinerja perusahaan. Organ utama *good corporate governance* adalah rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham perseroan, dewan komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi, sedangkan direksi sebagai pengelola perseroan. Adapun elemen lain yang mendukung struktur tata kelola tersebut adalah komite audit yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan, sekretaris perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektivitas penerapan tata kelola perusahaan di perseroan, audit internal dan manajemen risiko. Hal ini dapat diukur menggunakan laba perusahaan. Menurut Soemarso (Eka Hardikasari, 2011).

Ukuran perusahaan dapat diartikan besar kecilnya sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut, baik itu sumber daya modal ataupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain- lain. Pada dasarnya menurut Suwito dan Herawaty (2005) ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu : “perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Struktur kepemilikan terdiri dari dua golongan yakni kepemilikan pihak luar dan kepemilikan pihak dalam atau kepemilikan manajerial. Apabila dalam sebuah perusahaan yang telah dikelola lebih banyak saham yang dimiliki oleh pihak luar

maka perusahaan ditekankan agar memberitahukan tentang pelaporan keuangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi agar menjadi tanggung jawab kepada para pemegang saham (Hilmi dan Ali, 2012). Menurut Suchman (1995), kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh investor individual di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Besarnya kepemilikan oleh investor individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak mempunyai kendali atas perusahaan. Variabel ini ditunjukkan dengan prosentase saham yang dimiliki oleh publik dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar.

Risk Management Committee (RMC) atau komite pemantau risiko adalah salah satu unsur internal *good corporate governance* dalam mengelola manajemen risiko perusahaan. RMC adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung pada dewan komisaris yang ditujukan untuk membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan serta penerapan atas pengelolaan risiko perusahaan. RMC adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung pada dewan komisaris yang ditujukan untuk membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan serta penerapan atas pengelolaan risiko perusahaan. *Risk Management Committee (RMC)* merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam, et al 2009). Dalam survey yang dilakukan oleh KPMG (2005) pada perusahaan-perusahaan Australia, menyatakan bahwa lebih dari setengah responden (54%) telah memiliki RMC, di mana sebesar 70% tergabung dengan komite audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Retno (2018) dengan perbedaan pada periode penelitian yaitu 2016-2018. Penelitian ini juga menambahkan variabel *Risk Management Committee* yang mengacu pada penelitian Agista dan Mimba (2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberikan judul “**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT*”.**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang tergolong sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?
2. Apakah Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?
5. Apakah Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?
6. Apakah *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

2. Untuk membuktikan secara empiris apakah Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
6. Untuk membuktikan secara empiris apakah *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh Komisaris independen, Proporsi dewan komisaris, Komite audit, Ukuran perusahaan, Struktur kepemilikan publik, dan *Risk Management Committee* terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang lebih peduli terhadap isu lingkungan.

- b. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat menjadikan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan program SPSS versi 20.